

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan jumlah penduduk secara terus menerus dapat menjadi permasalahan yang serius bagi negara di dunia, terutama negara berkembang (Nurjannah & Susanti, 2018). Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat. Penduduk Indonesia mencapai 275 juta jiwa pada tahun 2022 atau sebanyak 3,4% dari total populasi di dunia (wikipedia, 2022). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan, pada tahun 2020 jumlah penduduk di Indonesia mencapai 270.203,9 jiwa, pada tahun 2021 mencapai 272.682,5 jiwa dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah penduduk yaitu mencapai 275.773,8 jiwa (BPS, 2022).

Jumlah penduduk yang besar disatu sisi dapat menjadi salah satu kekuatan yang besar untuk Indonesia yaitu sebagai sumber daya manusia yang potensial dan produktif, hal tersebut berperan penting terhadap kesuksesan pembangunan nasional. Namun dilain sisi, peningkatan jumlah penduduk dapat menyebabkan beban negara menjadi semakin besar yaitu dalam hal pencapaian pemerataan kesejahteraan secara umum sehingga perlu pemecahan masalah lebih lanjut terkait permasalahan dalam hal kependudukan (Imelda Siregar, 2019).

Permasalahan pertumbuhan penduduk yang tinggi berimplikasi besar terhadap tujuan pembangunan nasional, mulai dari pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sandang, pangan dan papan serta keamanan. Pertumbuhan penduduk yang stabil yaitu adanya keseimbangan dinamis antara faktor yang meningkatkan angka kelahiran dan menurunkan jumlah penduduk (kematian), oleh karena itu angka kelahiran, angka kematian dan migrasi yang dilakukan penduduk merupakan salah satu pendorong pertumbuhan penduduk. Dalam upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan menurunkan angka kelahiran dimana pemerintah menyusun kebijaksanaan yang dikenal dengan Program keluarga Berencana (KB) (Wulandari, 2020).

Salah satu permasalahan kesehatan di Indonesia saat ini yaitu masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan masih jauh dari target SDGs. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah pendekatan *safe motherhood* yang terdiri dari empat pilar salah satunya yaitu Keluarga Berencana (KB) dengan keluarga berencana angka kematian ibu dapat ditekan dari penyebab terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu dekat jarak persalinan (Ansori, 2021). Manfaat dari program keluarga berencana dalam bidang kesehatan yaitu pencegahan kematian dan kesehatan ibu serta membebaskan perempuan dari kecemasan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, menghindari terjadinya

gangguan psikologis akibat aborsi yang tidak aman, serta terhadap tuntunan perkembangan sosial terhadap peningkatan status perempuan dimasyarakat (Sembiring, Simbolon 2022).

Keluarga Berencana merupakan tindakan untuk mencapai kesejahteraan melalui konseling perkawinan, pengobatan kemandulan dan pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan pada pasangan suami istri, mengatur jumlah anak, dan jarak kelahiran anak. Keluarga berencana bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga serta menciptakan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran serta pengendalian pertumbuhan penduduk. Sasaran program KB yaitu meliputi sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Kelompok sasaran langsung program KB yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan, sedangkan kelompok sasaran tidak langsung yaitu pelaksana dan pengelola KB dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran dengan pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam mencapai keluarga yang berkualitas dan sejahtera. (Matahari et al., 2018). Dari segi kependudukan, tujuan Keluarga Berencana yaitu pengendalian laju pertumbuhan penduduk (Rosdiana et al., 2021). Dalam bidang kesehatan Peningkatan pelayanan KB merupakan upaya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu yang masih tinggi di Indonesia (Matahari et al., 2018). Sebanyak 95% Penduduk

Indonesia telah mengetahui program Keluarga Berencana (KB), namun hanya sekitar 61% yang memiliki kesadaran untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB), dari banyaknya masyarakat yang tidak mengikuti program KB terdapat 9% yang memiliki keinginan, namun karena beberapa pertimbangan yang menyebabkan mereka tidak mengikuti program KB (Rohaeni, 2021)

Keberhasilan program keluarga berencana dapat mengatasi permasalahan terkait kepadatan penduduk dan menekan Angka Kematian Ibu (AKI). Kelancaran suatu program dipengaruhi oleh kepatuhan masyarakat dalam mengikuti program keluarga berencana. Kepatuhan adalah mematuhi perintah atau arahan yang diberikan (R. Rahmawati et al., 2022) atau dapat di artikan sebagai perilaku seseorang sesuai dengan ketentuan oleh tenaga kesehatan yaitu seperti mematuhi nasehat atau arahan petugas kesehatan dalam melakukan tindakan (Sukmawati, 2021). Dalam pencapaian suatu tujuan faktor penentu yang perlu diperhatikan yaitu kepatuhan dalam melaksanakan arahan yang diberikan, apabila masyarakat tidak patuh terhadap arahan yang diberikan maka hal tersebut dapat mempengaruhi hasil yang akan di dapatkan (R. Rahmawati et al., 2022), misalnya jika peserta KB tidak patuh maka akan berdampak pada kegagalan dalam hal ini terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, sikap, jumlah anak, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, dukungan tenaga kesehatan dan dukungan

suami merupakan faktor yang mempengaruhi akseptor KB melakukan keluarga berencana (KB) (Sari et al., 2021). Faktor yang mempengaruhi kepatuhan akseptor melakukan Keluarga Berencana (KB) antara lain pendidikan, pekerjaan, tingkat pengetahuan, sikap, jumlah anak, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, dukungan tenaga kesehatan dan dukungan suami.

Kegagalan program keluarga berencana dapat dilihat dari kegagalan kontrasepsi sehingga menimbulkan KB mengalami kegagalan yaitu terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan hal tersebut dikarenakan ketidakpatuhannya akseptor KB dalam menggunakan kontrasepsi. Menurut beberapa penelitian kegagalan kontrasepsi merupakan penyebab utama kehamilan tidak diinginkan di seluruh dunia. Oleh karena itu perlu dilakukan Pembinaan dan pendampingan kepada akseptor KB aktif secara intens, agar mereka memiliki keberlanjutan menjadi peserta KB aktif dan membantu memecahkan masalah yang terjadi melalui konseling keluarga berencana (Wijayanti, 2021).

Menurut Hasto (2020) dalam Rahman & Ahri (2022) bahwa akseptor yang putus suntik atau tidak melakukan suntik KB ulang pada bulan pertama risiko kehamilan 10%, intra uterine device (KB IUD) terputus maka risiko kehamilan adalah 15%, putusnya penggunaan pil KB risiko kehamilan 20%. Jika risiko kehamilan 15-20%, maka

kemungkinan akan terjadi penambahan jumlah kehamilan sekitar 370.000 sampai 500.000 kehamilan.

Berdasarkan studi awal yang dilakukan di Puskesmas Bangkala Jumlah kunjungan ulang KB aktif mengalami fluktuatif yaitu pada tahun 2020 jumlah kunjungan yaitu 480 kunjungan, dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah Kunjungan yaitu sebanyak 531 kunjungan, namun pada tahun 2022 jumlah kunjungan KB aktif mengalami penurunan dimana jumlah kunjungan yaitu sebanyak 446 kunjungan (Bangkala, 2022). Kunjungan KB atau kurangnya keikutsertaan dalam KB akan berdampak pada tingginya risiko kehamilan (Purwanti, 2021). Salah satu upaya yang dilakukan dalam program KB yaitu penggunaan kontrasepsi, di wilayah kerja Puskesmas Bangkala alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan yaitu suntik.

Berdasarkan wawancara dengan 10 akseptor KB di wilayah kerja Puskesmas Bangkala, terdapat 6 akseptor KB menggunakan kontrasepsi suntik yang melewati jadwal penyuntikan kembali dengan alasan lupa (50%) dan tenaga kesehatan tidak ada dilokasi saat ingin melakukan penyuntikan ulang (33%), atau akseptor KB yang menggunakan kontrasepsi pil yang lupa atau tidak teratur meminum pil KB (17%), hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada beberapa akseptor KB yang yang tidak patuh dalam mengikuti program KB, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kegagalan KB sehingga kemungkinan besar terjadinya kehamilan yang tidak di inginkan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan meneliti mengenai “Faktor yang mempengaruhi kepatuhan akseptor KB mengikuti program Keluarga Berencana di wilayah kerja Puskesmas Bangkala Kota Makassar Tahun 2023”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adakah hubungan pengetahuan dengan kepatuhan mengikuti program Keluarga Berencana?
2. Adakah hubungan persepsi dengan kepatuhan mengikuti program Keluarga Berencana?
3. Adakah hubungan dukungan tenaga kesehatan dengan kepatuhan mengikuti program Keluarga Berencana?
4. Adakah hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan mengikuti program Keluarga Berencana?

C. Tujuan penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang berhubungan dengan kepatuhan akseptor KB mengikuti program Keluarga Berencana di wilayah kerja Puskesmas Bangkala.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan kepatuhan mengikuti program KB.

- b. Untuk mengetahui hubungan persepsi dengan kepatuhan mengikuti program KB.
- c. Untuk mengetahui hubungan dukungan tenaga kesehatan dengan kepatuhan mengikuti program KB.
- d. Untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan mengikuti program KB.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi lebih lanjut bagi peneliti lainnya yang tertarik untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kepatuhan akseptor KB mengikuti program Keluarga Berencana (KB).

2. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dijadikan bahan informasi dan bacaan bagi peneliti selanjutnya.

3. Manfaat Praktis

a. Bagi Puskesmas Bangkala

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada Puskesmas Bangkala dalam rangka pelaksanaan program keluarga berencana.

b. Bagi petugas kesehatan

Menambah informasi bagi petugas kesehatan puskesmas maupun dinas kesehatan terkait faktor yang berhubungan dengan kepatuhan akseptor KB mengikuti program KB.